

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kinerja pendamping desa Lubuk Sahung belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, lemahnya transparansi penggunaan dana desa, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi berbasis digital, serta belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Oleh sebab itu, masih memerlukan peningkatan melalui penguatan komunikasi dengan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi pengawasan dan pemberdayaan masyarakat
2. pelaksanaan pendampingan masyarakat desa di Desa Lubuk Sahung pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam seperti amanah, syura, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, implementasi prinsip-prinsip tersebut belum terlaksana secara sempurna karena masih terdapat rendahnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, pemerintahan yang baik harus mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil,

transparan, dan partisipatif. Oleh karena itu, pendamping desa dan pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat prinsip musyawarah, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa agar tercipta pemerintahan desa yang sesuai dengan nilai-nilai *Siyasah Idariyah* dan tujuan kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Lubuk Sahung diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pendamping desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif dan transparan. Pemerintah desa juga perlu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam musyawarah desa, penyusunan program pembangunan, serta pengawasan penggunaan dana desa agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya bersifat administratif semata.
2. Pendamping desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan melalui pendekatan yang lebih aktif dan komunikatif kepada masyarakat desa. Pendamping desa juga perlu memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi masyarakat desa agar tujuan pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada

pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Aparatur Pemerintah Desa Lubuk Sahung diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, terutama dalam penggunaan sistem administrasi berbasis digital dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan desa. Dengan meningkatnya kemampuan aparatur desa, maka tata kelola pemerintahan desa akan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masyarakat Desa Lubuk Sahung diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa, pengawasan pembangunan desa, serta program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, serta masyarakat harus memahami administrasi pengelolaan desa agar dalam pelaksanaan administrasi desa bisa diawasi langsung oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an terjemahan, Al-Qur'an, Departemen Agama RI, (Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015), An Nisa ayat 58

B. Buku

Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Bambang Trisantono Soemantri, Sosiologi masyarakat kata dan desa, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998)

Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017)

G.S Diponolo, Ilmu Negara, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975)

H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2015)

Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)

J. Mario Monterio, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)

John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Idariyah) (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2015)

Maria Farida Indrati Soeparto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kansius, 2015)

Mashuri Mashab, politik pemerintahan Desa di Indonesia, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013)

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2015)

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintah Desa, (Malang: Setra Pess, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Rozali Abdullah, Pelaksana Otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, (Jakarta: Persada 2007)

Sotardjo Kartohadikoesoemo, Desa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981)

Sumodiningrat, Gunawan, Ari Wulandari, Membangun Indonesia dari Desa, (yogyakarta: Media Pressindo, 2016)

C. Internet

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

<http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-Desa.html>

<http://.wikipedia.org/wiki/desa>

https://repository.uinib.ac.id/13480/2/Sherli%20Novita%20sari_18130_30044_BAB%20I.pdf

<https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

<https://cmspkh.com/40-hadis-keseharian-shofi/hadis-32-pemimpin-adalah-penanggung-jawab/>

<http://repository.uinfabengkulu.ac.id/4841/4/BAB%20III.pdf>

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ceria Tamasiro, Ronny Gosal, Gustaf Undap, Profesionalisme Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten kepulauan Talaud), Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor

1 Tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Fajri Zufa,S.SI, Riduan Hayadi, SE, Ipa Romika,S.SI, Kabupaten Seluma Dalam Angka 2021, No.Publikasi:17050.2101

Hidayat, Yusinta, Lutfi Fahrul Rizal, Aji Saptaji, Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Idariyah, UNES Law Review, Volume 6 Nomor 4 (2024)

Ivan, Pramana, Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iiyyah (Studi Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara), Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2023

Kumalawati, Elis, Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 Kota Mojokerto perspektif Siyasah Idariyah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021

Listari, Enta, Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah, Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Maya Melinda, Implementasiperan Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa Perspektif Siyâsah Dustûriyyah, skripsi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakutas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018

Putri, Kayla Rahmadiana, Beni Ahmad Saebani, Ridwan Eko Prasetyo, Implementasi Rationalisierung Der Herrschaft terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik di Pemerintahan Kota Bandung dalam Perspektif Siyasah Idariyah, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 7 Nomor 4 (2025)

Ricky Wahyudi Hasibuan, Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas, skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2021

Simbolon, Dewi Sarah, Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 5 Nomor 2 (2021)

Suhana, pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Tanjung pinang Tahun 2014

Talitha, Dhanyra Nayla, Analisis Efektivitas Program Pendampingan Desa: Upaya Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Volume 6 Nomor 1 (2024)

Tanjung, Fadhilatul Afifah, Ramadhan Syahmedi Siregar, Implementasi Undang-Undang N0 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Apbdes “Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus: Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong), Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies, Volume 4 Nomor 1 (2025)

Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10 Nomor 3

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa No 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3
Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3
Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa

